

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pemerintahan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembuatan anggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja, Hal ini dikarenakan menurut Bahri (2012) dimana didalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering kali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang kurang produktif, kurang efisien, minim kualitas dan kurangnya kreatifitas. Yang membuat negara terbebani oleh biaya-biaya yang pada dasarnya kurang produktif, efektif, efesiensi kerja yang pasti berdampak pada hasil kinerja dari organisasi sektor publik baik pusat atau daerah.

Cipta (2011) mengemukakan bahwa pengalokasian dana yang efektif memiliki arti bahwa suatu pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk pencapaian sasaran juga tujuan strategis yang dikumpul untuk dokumen-dokumen perencanaan strategi daerah. Sedangkan pengalokasian dana yang efisien memiliki arti bahwa untuk mewujudkan sasaran juga tujuan strategi tersebut sudah mengugnakan sumber daya yang paling sederhana dengan selalu mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif juga efisien tersebut bisa dicapai dengan penerapan performance based budgeting untuk menyusun perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Cipta lebih lanjut mengemukakan secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah suatu pendekatan sistematis dalam menyusun perencanaan anggaran yang terkait pengeluaran yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik dengan kinerja yang diperoleh dengan memakai informasi kinerja. Performance Budgeting mengalokasikan

sumber daya pada program, bukannya sebuah organisasi semata, juga menggunakan output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Pengkaitan biaya dengan output organisasi termasuk bagian integral didalam data atau dokumen anggaran. Oleh sebab itu pada penganggaran berbasis kinerja, informasi kinerja adalah media atau sarana untuk pengkaitan antara pengeluaran yang akan dilaksanakan organisasi sektor publik dengan kinerjanya. Informasi kinerja tersebut dinyatakan pada sebuah indikator kinerja serta target pencapaiannya. Sebab itu, salahsatu hal yang penting pada penganggaran berbasis kinerja yaitu penentuan ukuran atau indikator kinerja.

Endrayani, Adiputra dan Darmawan (2014) menjelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebuah bentuk reformasi anggaran dalam mengubah proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas pemerintah terkait mengenai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat membuat lingkup anggaran relevan dan waspada dilingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, keinginan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan dibantu oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu menciptakan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat mewujudkan transparansi.

Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa sistem anggaran kinerja pada umumnya adalah sistem yang terkait dengan kegiatan penyusunan program serta tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan juga sasaran program. Anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem penganggaran yang bisa menggabungkan perencanaan kinerja dengan anggaran 3 tahunan dimana akan terlihat hubungan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diinginkan.

Mubarak (2007) menjelaskan bahwa penerapan anggaran berdasarkan kinerja, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan pada proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara), karena bertujuan dalam mewujudkan transparansi juga akuntabilitas pelayanan publik juga efektifitas dari pelaksanaan kebijakan serta program. Hal ini bertujuan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, yang terkait dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaannya. Dalam mencegah kelemahan pada penganggaran juga pengelolaan keuangan, diperlukan penyempurnaan pada landasan konstitusional tentang pengelolaan anggaran negara, pemeriksaan sistem penyusunan anggaran, pengelolaan yang terbuka pada akuntabilitas hingga menambah kualitas sumber daya manusia.

Tetapi, ternyata pada implementasinya, penganggaran berbasis kinerja juga memiliki dampak terhadap organisasi itu sendiri. Adapun dampak penetapan metode penganggaran berbasis kinerja seperti dikemukakan oleh Diptyana (2007) yaitu :

1. Muncul perlunya penyimpanan data, yaitu data kualitatif ataupun kuantitatif, yaitu itu finansial maupun non finansial, bahwa data akan diubah menjadi informasi, dalam menetapkan indikator (ukuran), dan dalam mengevaluasi juga membuat keputusan pengalokasian dana yang cukup objektif.
2. Munculnya keperluan dalam mengukur output dan input, serta layaknya jenis indikator.
3. Biaya yang dikeluarkan lebih merujuk dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran, tidak kepada jumlah anggaran yang digunakan.
4. Dibutuhkannya sumber daya manusia yang bisa mengidentifikasi indikator dan bisa menganalisis biaya juga data.

Terdapat kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja menurut Kaweder, dkk (2008), yaitu:

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara berlanjut.
3. Sumber daya yang lengkap untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, orang).
4. Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang pasti.
5. pemikiran yang kuat untuk berhasil.

Dari kelima kondisi di atas, Bowo (2008) mengemukakan kepemimpinan dan sumber daya manusia adalah faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan organisasi yang menerapkan anggaran berbasis kinerja. Kesuksesan suatu organisasi atau setiap individu dalam suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang berkualitas senantiasa mengantisipasi perubahan dengan sekuat tenaga mengambil semua kesempatan, memotivasi pengikut mereka untuk menciptakan tingkat produktifitas yang tinggi, mengoreksi kinerja yang tidak sesuai dan mendorong organisasi ke arah capaian-capaiannya.

Salah satu Instansi Pemerintah yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008, yang sudah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 mengenai pembentukan organisasi juga tata kerja Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mana termasuk unsur staf membantu Gubernur untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada ditangan juga bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai

kepala daerah lewat Sekretaris Daerah. Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Prosedur Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di DPRD Sumatera Barat**”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas pada laporan ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur dan tahapan implementasi penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan di DPRD Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala ataupun masalah yang timbul dalam prosedur implementasi penganggaran berbasis kinerja di DPRD Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin penulis dicapai pada kegiatan magang ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan di DPRD Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau masalah yang timbul dalam prosedur implementasi penganggaran berbasis kinerja di DPRD Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang didapatkan dari kegiatan magang antara lain :

1. Bagi Penulis

- a. Menjadi sarana latihan juga aplikasi teori-teori yang diperoleh pada saat perkuliahan pada praktek kerja yang sebenarnya.
- b. Menambah ilmu serta wawasan mengenai pekerjaan dilapangan kerja
- c. Meningkatkan kreatifits serta keterampilan
- d. Mendapatkan pengalaman sebelum terjun di dunia kerja nanti

2. Bagi instansi Pemerintah (DPRD Sumatera Barat)

- a. Untuk membantu kelancaran aktifitas kerja di DPRD Sumatera Barat dengan adanya mahasiswa magang.
- b. Sebagai bentuk partisipasi di DPRD Sumatera Barat untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai Bagaimana Mengaitkan Antara Pendanaan dan Kinerja Yang akan Dicapai Oleh DPRD Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Magang ini terdiri dari 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat kegiatan magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menerangkan mengenai pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, manfaat dan fungsi anggaran, tujuan penyusunan anggaran, kegunaan dan keterbatasan anggaran, pengertian anggaran berbasis kinerja, fungsi dan Prinsip anggaran berbasis kinerja, proses penyusunan anggaran sektor publik, pengertian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, penilaian kinerja, tujuan penilain kinerja, manfaat penilaian kinerja, indikator kinerja, pengertian anggaran berbasis kinerja, karakteristik anggaran berbasis kinerja, proses perencanaan anggaran berbasis kinerja, tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, keunggulan dan kelemahan anggaran berbasis kinerja.

BAB III : Gambaran umum Di DPRD Sumatera Barat

Bab ini akan membahas gambaran umum di DPRD Sumatera Barat, yang meliputi sejarah ringkas, visi, misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

BAB IV : Prosedur Implementasi Penganggaran berbasis kinerja di DPRD Sumatera Barat

Bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai di DPRD Sumatera Barat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal

pelaksanaan pengelolaan anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.

BAB V : Penutup

Bab ini mengenai kesimpulan semua pembahasan dan memberikan saran yang mana akan bermanfaat dalam memecahkan permasalahan yang akan terjadi pada pelaksanaan nantinya.

